

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengendalkan pada bunga. Bank Islam atau yang biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan / perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam laulintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau yang biasa disebut dengan *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain:

- a. Memindahkan uang
- b. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening Koran
- c. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya
- d. Membeli dan menjual surat-surat berharga lainnya¹

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 1-3

e. Membeli jaminan bank

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan system bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, bank islam lahir sebagai salah satu solusi alternative terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat islam Indonesia ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam.²

2. Falsafah Operasional Bank Syariah

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah SWT untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari.

a. Menjauhkan diri daru unsur riba

- 1) Menghindari menggunakan system yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman: 34)
- 2) Menghindari penggunaan system presentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Al Imran:130)
- 3) Menghindari penggunaan system perdagangan/ penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan

² Ibid, hal 3

memperoleh kebaikan baik kuantitas maupun kualitas (HR. Muslim Bab Riba No. 1551 s/d 1567)

b. Menerapkan system bagi hasil dalam perdagangan

Dengan mengacu apada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus di landasi atas dasar system bagi hasil adan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang /jasa, mendorong kelancaran arus barang jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.³

2. Regulasi Perbankan di Indonesia dan Kedudukan Perbankan

Kasus di Indonesia secara periodic, pengaturan system perbankan di Indonesia diatur melalui undang-undang tentang perbankan. Seiring dengan dinamika perkembangan sosial ekonomi di tengah masyarakat di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang perbankan kemudian mengalami beberapa kali perubahan. Menyangkut perubahan regulasi yang mengakomodasi diberlakukannya bank syariah, tulisan ini, secara periodik akan melihat sejak diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1992 sampai diundangkannya UU nomor 21 Tahun 2008.

³ Ibid, hal.3

a. Periode Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992

Titik terang pendirian lembaga bank dengan sistem syariah, secara yuridis, muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam undang – undang ini, secara eksplisit dinyatakan, bahwa selain menyediakan layanan berbasis bunga, bank umum dan bank perkreditan rakyat dapat menyelenggarakan layanan penghimpunan dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.⁴

Ketentuan penyelenggaraan bank dengan system bagi hasil itu diatur dalam Bab II bagian kedua tentang usaha bank umum dan bagian ketiga tentang usaha bank perkreditan rakyat. Secara ekplisit, pada pasal 6 (m) disebutkan, bahwa salah satu usaha bank umum adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Demikian pula pada pasal 13 (d) disebutkan, bahwa bank perkerditan rakyat dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan tentang bank bagi hasil, seperti ditungkan dalam dua pasal tersebut, kemudian ditindalnajuti oleh PP No. 72 Tahun 1992.

⁴ <http://familydjavu.blogspot.co.id/2014/5/regulasi-perbankan-syariah.html>, diakses pada tanggal 16 Mei 2018 pukul 21.30 WIB

b. Periode Deregulasi 1 Juni 1983

Pada awal tahun 1980-an, sistem pengendalian tingkat bunga oleh pemerintah ini kemudian mengalami kesulitan. Bank-bank yang telah didirikan sangat tergantung kepada tersediannya likuiditas Bank Indonesia. Demikian juga karena pemerintah menentukan tingkat bunga maka tak ada persaingan antar bank. Hal ini kemudian tabungan menjadi tidak menarik dan alokasi dana tidak efisien. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengeluarkan deregulasi dibidang perbankan tanggal 1 Juni Tahun 1983 yang membuka belenggu penetapan tingkat bunga tersebut sebenarnya dengan dibukanya belenggu tingkat bunga ini maka timbullah kemungkinan bagi suatu bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar 0%, yang berarti merupakan penerapan sistem perbankan syariah melalui perjanjian murni berdasarkan prinsip bagi hasil. Deregulasi 1 Juni 1983 ini ternyata tidak berdampak langsung atas pelaksanaan sistem perbankan tanpa bunga. Sejak wacana pendirian sistem perbankan tanpa bunga dibicarakan di Indonesia pada pertengahan tahun 1970-an, ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini, yaitu operasi bank Islam yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, oleh karena hal itu tidak sejalan dengan Undang-Undang Pokok Perbankan yang berlaku, yaitu UU No. 14 Tahun 1967. konsep bank Islam dari segi ⁵politik juga dianggap berkonotasi ideologis, merupakan bagian

⁵ Ibid

atau berkaitan dengan konsep negara Islam, sehingga hal itu tidak dikehendaki pemerintah. Pada saat itu masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari negara-negara Timur Tengah masih dicegah, antar lain oleh kebijakan pembatasan bank asing yang ingin membuka kantor cabang di Indonesia. Sedangkan, pendirian bank baru oleh orang Indonesia sendiri masih belum dimungkinkan.

Oleh karena belum dimungkinkannya pendirian bank baru, sedangkan bank-bank yang ada masih belum menganggap sistem bank tanpa bunga sebagai bisnis yang dapat menguntungkan, dan bank Islam belum dapat berdiri, maka digunakan badan hukum koperasi sebagai bentuk hukumnya. Pemilihan badan hukum koperasi sebagai wadah penerapan sistem perbankan syariah telah dimulai oleh Koperasi Jasa Keahlian Teknosa di Bandung sejak awal tahun 1980-an. Kemudian, di Jakarta didirikan Baitut Tamwil kedua dengan nama koperasi simpan pinjam Ridho Gusti yang didirikan tanggal 25 September 1988⁶

c. Periode Tahun 2000

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*.

Menimbang, mengingat, memerhatikan: memutuskan, menetapkan: fatwa tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*

⁶ Ibid

Pertama: ketentuan pembiayaan:

- 1) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut⁷ serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lali, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *Mudharib* tidak melakukan

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.250-251

penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap al-al yang telah disepakati bersama dalam akad.

- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: rukun dan syarat pembiayaan

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan *ijab* dan *kabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad),

Dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.

- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

B. ROA (*Return On Assets*)

ROA (*Return On Assets*) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan profit atau laba (bisa disebut profitabilitas) dengan cara membandingkan laba bersih dengan sumber daya atau total aset yang dimiliki. Fungsinya adalah untuk melihat seberapa efektif perbankan dalam menggunakan asetnya dalam menghasilkan pendapatan. Semakin besar nilai ROA artinya semakin baik kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba. Rumus untuk menghitung ROA yakni:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

ROA termasuk salah satu dari rasio profitabilitas. Di mana rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga digunakan sebagai indikator tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antarabagai komponen yang ada pada laporan keuangan neraca dan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan ataupun peningkatan, sekaligus juga mencari sebab terjadinya perubahan tersebut.

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan yaitu:

1. Untuk mengukur dan menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Untuk menilai besarnya laba bersih
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.⁸

C. CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. CAR mencerminkan modal sendiri perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin besar CAR maka semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba karena dengan modal yang besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan. Rendahnya CAR dikarenakan peningkatan ekspansi aset berisiko yang tidak diimbangi dengan penambahan modal menurunkan kesempatan bank untuk berinvestasi dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank sehingga berpengaruh pada profitabilitas.

⁸ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), hal. 196-198

Rasio CAR ini masuk dalam rasio solvabilitas bank. Di mana rasio solvabilitas bank merupakan ukuran kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Rasio ini merupakan alat ukur untuk melihat kekayaan bank untuk melihat efisiensi jalannya usaha bank bagi pihak manajemen bank tersebut.

Rasio ini penting karena dengan menjaga CAR pada batas aman (minimal 8%), berarti juga melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin besar nilai CAR mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian. CAR dapat diperoleh dengan membagi total modal dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR), seperti rumus di bawah:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Baik bank nasional maupun bank internasional harus memenuhi rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*), karena rasio tersebut merupakan aspek penting bagi dunia perbankan. Untuk memenuhi rasio tersebut bank memiliki dua sumber modal, yaitu modal inti dan modal pelengkap yang kemudian dibagi lagi menjadi beberapa pos. Berikut pembagian pos-pos modal inti dan modal pelengkap:

a. Modal Inti

Modal inti untuk memenuhi CAR suatu bank dibagi menjadi 9 pos, yaitu:

- 1) Modal setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. Bagi bank milik koperasi modal setor terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya
- 2) Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham
- 3) Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga
- 4) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS
- 5) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS
- 6) Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan
- 7) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti . bila tahun lalu rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti
- 8) Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan. Laba ini hanya diperhitungkan 50% sebagai modal inti. Bila tahun berjalan rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti.

- 9) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut

Bila dalam pembukuan bank terdapat *goodwill*, maka jumlah modal inti harus dikurangkan dengan nilai *goodwill*. Bank syariah dapat mengikuti sepenuhnya pengkategorian unsur-unsur tersebut sebagai modal inti, karena tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri dari cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Berikut ini merupakan macam-macam modal pelengkap bank:

- 1) Cadangan revaluasi aktiva tetap
- 2) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan
- 3) Modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri:
 - a) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh
 - b) Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI
 - c) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank

- d) Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi
- 4) Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a) Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank
 - b) Mendapat persetujuan dari BI
 - c) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan
 - d) Minimal berjangka waktu 5 tahun
 - e) Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI
 - f) Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir (kedudukannya sama dengan modal).

Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti. Khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, bank syariah tidak dapat mengkategorikannya sebagai modal, karena pinjaman dalam bank syariah harus tunduk pada prinsip *qard*, sedangkan *qard* tidak boleh diberikan syarat-syarat seperti ciri-ciri yang disebutkan di atas.⁹

D. BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

BOPO (Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional) merupakan rasio yang menggambarkan efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya. Belanja operasional adalah biaya bunga yang diberikan pada

⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 96-98

nasabah sedangkan pendapatan operasional adalah bunga yang didapatkan dari nasabah. Semakin kecil nilai BOPO artinya semakin efisien perbankan dalam beroperasi. BOPO dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Efisiensi merupakan indikator yang menunjukkan keberhasilan suatu usaha yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau organisasi. Untuk mengukur efisiensi sebuah usaha bisa dilakukan dengan membandingkan *input* dengan *output*. *Input* yang diproses dengan proses tertentu akan memberikan *output* menurut ukuran dan kriteria tertentu. Jika dengan faktor produksi tertentu dapat menghasilkan *output* yang optimal, maka efisiensi suatu sistem manajemen yang sudah diterapkan bisa membuat suatu proses usaha lebih produktif.

Efisiensi dan produktivitas memang saling berhubungan. Semakin besar rasio produktivitas suatu usaha, semakin tinggi tingkat produktivitasnya dan semakin tinggi pula tingkat efisiensinya. Dari dua konsep tersebut dapat disatukan dalam konsep efisiensi produksi. Di mana efisiensi produksi merupakan kemampuan perusahaan untuk melakukan produksi maksimum pada suatu tingkat biaya yang dikeluarkan. Suatu sistem produksi dapat dikatakan efisien jika memenuhi kriteria berikut:

1. Minimalisasi biaya untuk menghasilkan jumlah *output* yang sama
2. Memaksimalkan produksi dengan jumlah biaya yang sama

Efisiensi produksi tidak hanya dapat dilakukan dengan melakukan kontrol dengan melakukan minimalisasi biaya-biaya *input* saja, namun juga dapat dilakukan dengan memperhatikan produktivitas *output* secara maksimal. Maka dari itu, agar bank syariah mampu memperoleh hasil produksi secara optimal, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seberapa jauh mekanisme pembiayaan mampu memberikan hasil maksimum dari suatu investasi
2. Apakah dengan mekanisme pembiayaan yang diterapkan bank yang bersangkutan, bank mampu menjamin kinerja yang efektif dari investasi pembiayaan yang diberikan, baik dari sisi jangka waktu maupun biaya
3. Sejauh mana mekanisme yang diterapkan oleh bank itu mampu menjamin tidak terjadinya pembiayaan macet
4. Sejauh mana mekanisme pembiayaan mampu memberikan manfaat akan munculnya peluang investasi.¹⁰

Dalam dunia perbankan, BOPO merupakan indikator yang menunjukkan efisiensi dari usaha yang sudah dilakukannya. Jika nilai BOPO semakin kecil, maka itu menunjukkan bahwa dengan sumber daya yang ada sebuah bank dapat menghasilkan pendapatan dengan optimal. Dengan melihat rasio BOPO, maka akan diketahui efektivitas dari kinerja manajemen bank dalam pemanfaatan sumber daya yang ada.

¹⁰ Ibid, hal. 152-153

E. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP) adalah nilai barang dan jasa akhir berdasarkan harga pasar yang diproduksi oleh sebuah perekonomian dalam satu periode dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang berada dalam perekonomian tersebut. Barang dan jasa yang menjadi indikator dalam PDB merupakan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen terakhir. Kemudian harga pasar tersebut dihitung berdasarkan tingkat harga yang berlaku pada periode yang bersangkutan. Selanjutnya, faktor-faktor produksi yang berlokasi di negara yang bersangkutan dalam perhitungan PDB tidak mempertimbangkan asal faktor produksi yang digunakan dalam menghasilkan *output*.¹¹

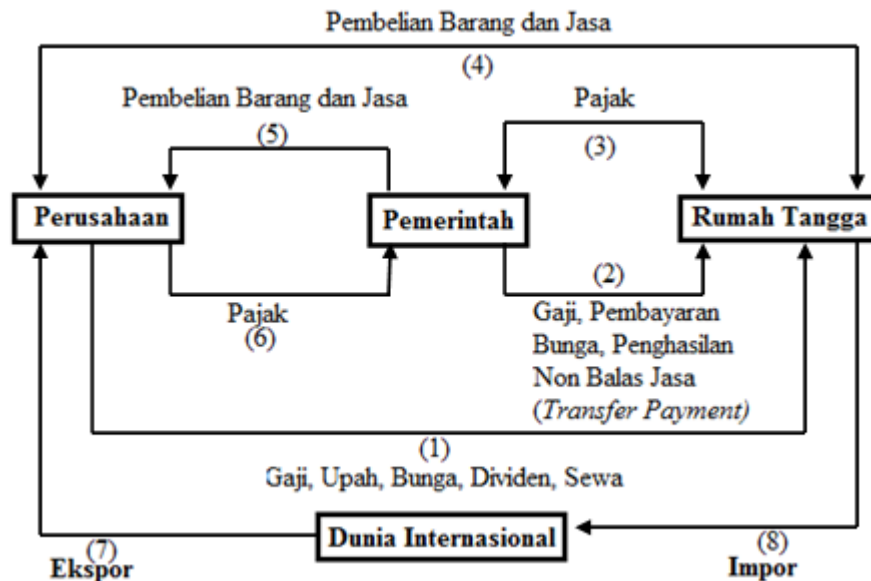
PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut. Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakaifaktor produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul faktor produksi yang digunakan. Secara kasar PDB dapat dijadikan ukuran kesejahteraan ekonomi suatu negara, akan tetapi ukuran ini tidak terlalu tepat. Mengapa dikatakan tidak tepat karena jika hanya melihat PDB, perhitungan tersebut masih mengabaikan faktor jumlah penduduk.

¹¹Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), hal. 224

Untuk lebih memahami konsep dan perhitungan PDB, maka terlebih dahulu perlu memahami hal-hal sebagai berikut:

1. Siklus Aliran Pendapatan (*Circular Flow*)

Gambar 2.1



Siklus aliran pendapatan seperti diagram di atas merupakan sebuah model yang menggambarkan bagaimana interaksi antar para pelaku ekonomi menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai guna masing-masing pelaku ekonomi. Model *Circular Flow* membagi perekonomian menjadi empat sektor, yaitu:

- Sektor Rumah Tangga, di mana sektor ini terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen dan identik
- Sektor Perusahaan, di mana sektor ini terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa

- c. Sektor Pemerintah, merupakan sektor yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan
- d. Sektor Luar Negeri, merupakan sektor perekonomian dunia, di mana perekonomian melakukan transaksi ekspor-impor.

2. Tiga Pasar Utama

Untuk analisis ekonomi makro, pasar dikelompokkan menjadi tiga pasar utama, yaitu:

a. Pasar Barang dan Jasa

Pasar ini merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa, di mana permintaan berasal dari sektor rumah tangga dan pemerintah. Sedangkan penawaran berasal dari sektor perusahaan. Pada pasar ini umumnya merupakan permintaan barang dan jasa akhir, tidak untuk diproduksi atau didistribusikan lagi

b. Pasar Tenaga Kerja

Pasar ini merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Di mana permintaan tenaga kerja berasal dari sektor perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri, sedangkan penawaran berasal dari sektor rumah tangga dan sektor luar negeri

c. Pasar Uang dan Modal

Pasar ini merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran uang. Jual beli pada pasar ini bukan memperjual belikan bentuk fisik uang, melainkan hak penggunaan uang tersebut. Penawaran

uang berasal dari pihak-pihak yang bersedia menunda hak penggunaan uangnya, sedangkan permintaan uang berasal dari pihak-pihak yang membutuhkan uang. Jika hak penggunaan yang diperjualbelikan adalah setahun atau kurang, maka pasar tersebut termasuk dalam kategori pasar uang. Jika hak penggunaan uang yang diperjualbelikan lebih dari setahun, maka pasar tersebut adalah pasar modal.

3. Metode-metode Penghitungan PDB

Dalam menghitung Produk Domestik Bruto terdapat tiga cara yang dapat digunakan, yaitu:

a. Metode *Output (output Approach)* atau Metode Produksi

Pada metode ini, PDB merupakan total *output* yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Cara perhitungan dalam praktik adalah dengan cara membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi. Jumlah *output* masing-masing sektor merupakan jumlah *output* seluruh perekonomian. Dalam perhitungan PDB dengan metode produksi yang dijumlahkan adalah nilai tambah masing-masing sektor. Yang dimaksud nilai tambah adalah selisih antara nilai *output* dengan nilai *input* antara.

$$NT = NO - NI$$

Di mana: NT = nilai tambah

NO = nilai *output*

NI = nilai *input* antara

Aktivitas produksi yang baik adalah aktivitas yang menghasilkan $NT > 0$. Dengan demikian, persamaan PDB adalah:

$$PDB = \sum_{i=1}^n NT$$

Di mana: $n =$ sektor produksi ke 1, 2, 3,..., n ¹²

b. Metode Pendapatan (*Income Approach*)

Metode pendapatan ini memandang nilai *output* perekonomian sebagai nilai total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Hubungan antara tingkat *output* dengan faktor-faktor produksi yang digunakan digambarkan dalam fungsi produksi seperti di bawah ini:

$$Q = f(L, K, U, E)$$

Di mana : $Q =$ *output*

$L =$ tenaga kerja

$K =$ barang modal

$U =$ uang / finansial

$E =$ kemampuan kewirausahaan

Balas jasa untuk tenaga kerja adalah upah atau gaji. Untuk barang modal adalah pendapatan sewa. Untuk pemilik uang / aset finansial adalah pendapatan bunga. Sedangkan untuk pengusaha adalah keuntungan. Total balas jasa faktor produksi disebut Pendapatan Nasional (PN)

¹² Ibid, hal. 229

$$PN = w + i + r + \pi$$

Di mana: w = upah

i = pendapatan bunga

r = pendapatan sewa

π = keuntungan

c. Metode Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

Menurut metode pengeluaran ini, nilai PDB merupakan nilai total pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Menurut metode ini ada beberapa jenis pengeluaran agregat dalam suatu perekonomian:

1) Konsumsi Rumah Tangga

Dipakai untuk konsumsi akhir barang dan jasa yang habis pakai dalam tempo setahun atau kurang (*durable goods*), maupun barang yang dapat dipakai lebih dari setahun (*non-durable goods*)

2) Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa akhir

3) Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto

PMTDB merupakan pengeluaran sektor dunia usaha. Pengeluaran ini dilakukan untuk memelihara dan memperbaiki kemampuan menciptakan atau meningkatkan nilai tambah. Yang

termasuk dalam PMTDB adalah perubahan stok barang jadi atau barang setengah jadi

4) **Ekspor Neto (*Net Export*)**

Selisih antara nilai ekspor dengan impor. Ekspor neto yang positif menunjukkan bahwa ekspor lebih besar daripada impor, begitu juga sebaliknya. Perhitungan ini dilakukan apabila perekonomian melakukan transaksi dengan perekonomian negara lain atau perekonomian dunia.

Nilai PDB berdasarkan metode pengeluaran adalah nilai total lima jenis pengeluaran tersebut:

$$PDB = C + G + I + (X - M)$$

Di mana: C = konsumsi rumah tangga

G = pengeluaran pemerintah

I = PMTDB

X = ekspor

M = impor¹³

F. Inflasi

inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga barang komoditas dan jasa selama suatu periode tertentu berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran

¹³ Ibid, hal. 231-234

distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara berkelanjutan. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi.

Inflasi diukur dengan tingkat inflasi yang merupakan tingkat perubahan tingkat harga secara umum. Persamaannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{tingkat harga}_t - \text{tingkat harga}_{t-1}}{\text{tingkatharga}_{t-1}} \times 100$$

$$= \text{Rate of Inflation}$$

Atau

$$\frac{\text{Nominal GDP}}{\text{Real GDP}} \times 100 = \text{Implicit Price Deflator}$$

1. Jenis-jenis Inflasi Berdasarkan Tingkat Keparahan

Inflasi dapat digolongkan menjadi beberapa tingkatan keparahan, yaitu sebagai berikut:

a. *Moderate Inflation*

Kenaikan tingkat harga yang lambat. Orang-orang masih mau memegang uang dan menyimpan kekayaannya dalam bentuk uang daripada dalam bentuk aset riil

b. *Galloping Inflation*

Inflasi pada tingkat ini terjadi pada tingkat 20% sampai dengan 200% per tahun. Pada tingkat ini orang-orang lebih memilih untuk

memegang uang secukupnya dan menyimpan kekayaannya dalam aset riil

c. *Hyper Inflation*

Inflasi jenis ini terjadi pada tingkat yang sangat tinggi yaitu pada jutaan sampai triliyunan persen per tahun

2. Jenis-jenis Inflasi Berdasarkan Penyebabnya

Selain itu, inflasi juga dapat digolongkan berdasarkan penyebab-penyebabnya, yaitu sebagai berikut:

a. *Natural Inflation* dan *Human Error Inflation*

Inflasi terjadi karena sebab-sebab alamiah yang tidak dapat dicegah dan inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia

b. *Actual/ Anticipated/ Expected Inflation* dan *Unticipated/ Unexpected Inflation*

Pada *Expexted Inflation* tingkat suku bunga pinjaman riil akan sama dengan tingkat suku bunga pinjaman nominal dikurangi inflasi atau secara notasi, $r_t^e = R_t - \pi_t^e$, sedangkan pada *Unexpected Inflation* tingkat suku bunga pinjaman nominal belum atau tidak merefleksikan kompensasi terhadap efek inflasi

c. *Demand Pull* dan *Cost Push Inflation*

Demand Pull Inflation diakibatkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi permintaan agregatif dari barang dan jasa pada suatu perekonomian. Sementara *Cost Push Inflation*

merupakan inflasi yang terjadi akibat adanya perubahan-perubahan pada sisi penawaran agregatif dari barang dan jasa pada suatu perekonomian

d. *Spiralling Inflation*

Inflasi yang terjadi secara beruntun akibat dari inflasi sebelumnya

e. *Imported Inflation* dan *Domestic Inflation*

Imported Inflation merupakan inflasi yang dialami oleh negara lain yang mempengaruhi tingkat inflasi di suatu negara karena harus menjadi *price taker* dalam perdagangan internasional. Sedangkan *domestic inflation* merupakan inflasi yang hanya terjadi dalam satu negara saja dan tidak terlalu berdampak terhadap negara lain.¹⁴

G. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah kajian terdahulu yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan proposal skripsi ini:

1. Defri¹⁵

Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Likuiditas dan Efisien Operasional terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI menyimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA pada perusahaan perbankan yang

¹⁴Adiwarman A. Karim, *ekonomi makro islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 135-139

¹⁵ Defri, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Likuiditas dan Efisien Operasional terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI*, 2012

terdaftar di BEI, LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan CAR dan BOPO sebagai variabel independen dan ROA sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada Bank Syariah Mandiri saja.

2. Julita¹⁶

Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Non Performing Loan (Npl) Dan Capital Adequacy Ratio (Car) Terhadap Profitabilitas (Roa) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bei dapat disimpulkan bahwa bahwa *Non performing Loan* (NPL) secara parsial berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA). Namun *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap *Ruturn On Asset* (ROA). Sedangkan secara simultan penelitian membuktikan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel CAR sebagai variabel independen dan ROA sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan empat variabel

¹⁶ Julita, *Pengaruh Non Performing Loan (NPL) Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI*, 2013

independen dan dengan kombinasi antara rasio keuangan bank dan faktor ekonomi makro.

3. Rofi'i¹⁷

Dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit ratio, dan Beban Operasional – Pendapatan Operasional terhadap profitabilitas di Bank Mega Syariah menyimpulkan secara bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, LDR berpengaruh negative tidak signifikan terhadap ROA, dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa CAR, LDR, dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pengaruh CAR dan BOPO terhadap ROA. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini terdapat variabel PDB dan Inflasi serta Bank yang menjadi objek kajian adalah Bank Syariah Mandiri.

4. Fitriana¹⁸

Dalam skripsinya yang berjudul Analisis Perbandingan Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Non Performing Finance (NPF)* Terhadap Profitabilitas Antara Bank BNI Syariah Dan Bank BRI Syariah Periode 2010-2017 menyimpulkan bahwa Terdapat perbedaan pengaruh dari tingkat rasio CAR terhadap profitabilitas antara BNI

¹⁷ Andrianas Rofi'i, *Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit ratio, dan Beban Operasional – Pendapatan Operasional terhadap profitabilitas di Bank Mega Syariah*, 2018

¹⁸ Irma Fitriana, *Analisis Perbandingan Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Non Performing Finance (NPF) Terhadap Profitabilitas Antara Bank BNI Syariah Dan Bank BRI Syariah Periode 2010-2017*, 2018

Syariah dan BRI Syariah, (2) Terdapat perbedaan pengaruh dari tingkat rasio CAR dan NPF terhadap profitabilitas antara BNI Syariah dan BRI Syariah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti pengaruh CAR terhadap profitabilitas bank, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan metode asosiatif, sedangkan pada penelitian di atas menggunakan metode komparatif, selain itu periode penelitiannya juga lebih panjang, yaitu dari tahun 2008 sampai 2017.

5. Yanuardi, dkk¹⁹

Dalam penelitiannya yang berjudul Faktor Determinan Atas Profitabilitas Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat diambil kesimpulan bahwa risiko kredit, permodalan, dan inflasi berpengaruh signifikan dan berkorelasi positif terhadap profitabilitas bank. Efisiensi manajemen berpengaruh signifikan dan berkorelasi negatif terhadap profitabilitas bank. Risiko likuiditas dan produk domestik bruto tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank.

6. Fitriana²⁰

Dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Inflasi dan Bank Indonesia Rate terhadap Profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia menyimpulkan bahwa secara parsial inflasi dan BI rate berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas PT. Bank Muamalat

¹⁹ Alindra Yanuardi, dkk, *Faktor Determinan Atas Profitabilitas Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, 2014

²⁰ Menik Nila Fitriana, *Pengaruh Inflasi dan bank Indonesia Rate terhadap Profitabilitas PT. Bank Muamalat Indonesia*, 2015

Indonesia, begitu juga jika diuji secara simultan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel inflasi sebagai variabel independen dan ROA sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini terdapat empat variabel dependen yang mana dua dari rasio keuangan Bank Syariah Mandiri dan dua dari faktor ekonomi makro, yaitu PDB dan Inflasi.

7. Anto²¹

Dalam skripsinya yang berjudul Pengaruh Variabel-variabel Makro Ekonomi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2006-2011) dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi, pendapatan nasional, *market share*, dan jumlah uang yang beredar dalam jangka waktu pendek maupun panjang tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah, sedangkan variabel tingkat suku bunga baik jangka pendek maupun panjang berpengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel pendapatan nasional dan inflasi sebagai variabel independen, sedangkan perbedaannya rasio profitabilitas yang digunakan pada penelitian ini adalah rasio ROA, selain itu penelitian ini hanya mengkaji Bank Syariah Mandiri saja.

²¹ Anto, Pengaruh Variabel-variabel Makro Ekonomi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2006-2011), 2012

8. Sodiq²²

Dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Variabel Makro Ekonomi terhadap Profitabilitas Bank syariah di Indonesia Periode 2009-2014 dapat disimpulkan bahwa secara parsial Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA bank syariah, sedangkan GDP/PDB dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap ROA bank syariah di Indonesia. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel PDB dan inflasi sebagai variabel independen serta ROA sebagai variabel dependen, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini terdapat empat variabel dependen yang mana dua dari rasio keuangan Bank Syariah Mandiri dan dua dari faktor ekonomi makro, yaitu PDB dan Inflasi, selain itu objek kajian penelitian ini fokus pada Bank Syariah Mandiri saja.

9. Dwidingga²³

Dalam skripsinya yang berjudul Analisis Inflasi, Gross Domestic Product, Net performing Financing, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional, Net Margin terhadap Return on Asset Perbankan Syariah di Indonesia periode 2010-2013 dapat diambil kesimpulan bahwa secara parsial variabel inflasi, NPF, BOPO, dan Net margin berpengaruh signifikan terhadap ROA perbankan syariah di Indonesia, sedangkan variabel GDP tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

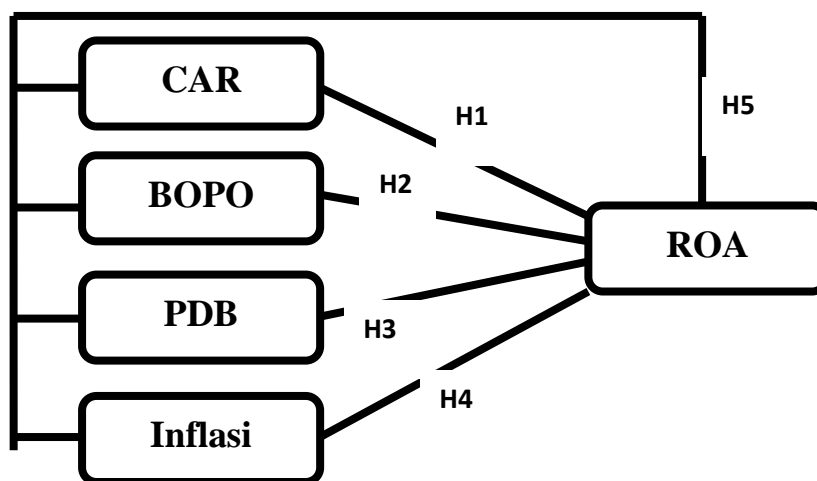
²² Amirus Sodiq, *Pengaruh Variabel Makro Ekonomi terhadap Profitabilitas Bank syariah di Indonesia Periode 2009-2014*, 2015

²³ Yoga Dwidingga, *Analisis Inflasi, Gross Domestic Product, Net performing Financing, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional, Net Margin terhadap Return on Asset Perbankan Syariah di Indonesia periode 2010-2013*, 2015

Secara simultan variabel inflasi, GDP, NPF, BOPO, dan Net margin berpengaruh signifikan terhadap ROA perbankan syariah di Indonesia. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variable inflasi, GDP/PDB, dan BOPO sebagai variabel independen serta ROA sebagai variabel dependen, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini juga menggunakan CAR sebagai variabel independen dan yang menjadi objek kajiannya fokus pada Bank Syariah Mandiri saja.

H. Kerangka Konseptual

Gambar 2.2



Keterangan :

H1: hubungan parsial antara variabel CAR dengan ROA

H2: hubungan parsial antara variabel BOPO dengan ROA

H3: hubungan parsial antara variabel PDB dengan ROA

H4: hubungan parsial antara variabel Inflasi dengan ROA

H5: hubungan simultan antara variabel CAR, BOPO, PDB, dan Inflasi dengan ROA

I. Hipotesis Penelitian

1. H₀ : variabel CAR berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri
H₁ : variabel CAR tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri
2. H₀ : variabel BOPO berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri
H₁ : variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri
3. H₀ : variabel PDB berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri
H₁ : variabel PDB tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri
4. H₀ : variabel inflasi berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri
H₁ : variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri
5. H₀ : variabel rasio CAR, rasio BOPO, PDB, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri

H1 : variabel rasio CAR, rasio BOPO, PDB, dan inflasi secara simultan tidak berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Syariah Mandiri